

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Teori Keagenan**

Penggunaan teori keagenan digunakan baik pada sektor privat maupun sektor publik. Teori principal-agen menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok atau organisasi. Salah satu pihak (*principal*) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit dengan pihak lain (agent) dengan harapan bahwa agen akan melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipal, seperti menyajikan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan segala yang terjadi pada saat kegiatan sedang berlangsung (Abdul, 2009). Teori keagenan telah dipergunakan pada sektor publik khususnya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada sektor publik, teori keagenan bertujuan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat atas sumber daya yang digunakan dalam memenuhi hajat hidup orang banyak. Pemerintah memberikan wewenang kepada pihak lain untuk mengelola sumber daya hal terjadi karena pemerintah tidak dapat melakukan pengelolaan dan pengalokasian sumber daya secara sendirian. Pembuatan anggaran menjadi mekanisme yang penting

untuk alokasi sumber daya karena adanya keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah.

Dalam hal ini pemerintah pusat (principal) melakukan otonomi yang luas kepada masing-masing kota maupun kabupaten untuk mengelola daerahnya secara mandiri, selanjutnya pemerintah daerah wajib menyajikan, melaporkan apapun yang terjadi dalam menjalankan pemerintahan, dan mempertanggungjawabkannya. Laporan ini bermanfaat bagi para pengguna informasi dan informasi ini juga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

## 2. Anggaran

Dalam lingkup pemerintah daerah peran anggaran menjadi sangat relevan dan penting. Hal ini karena berkaitan dengan dampak anggaran dan kinerja pemerintah daerah, serta hubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2009:61), dalam buku Akuntansi Sektor Publik, definisi anggaran adalah sebagai berikut : ***“Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam waktu financial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran.”***

Sedangkan menurut Mahsun, dkk (2011), Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai oleh suatu

organisasi dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran moneter.

Anggaran sektor publik merupakan acuan dari penyusunan anggaran pemerintah yang digunakan sebagai alat utama untuk melaksanakan semua kewajiban, janji dan kebijakannya dalam rencana-rencana nyata dan terintegrasi dalam hal tindakan yang harus diambil, hasil yang akan, belanja yang dibutuhkan dan sumber-sumber belanja tersebut.

Fungsi Anggaran sektor publik dalam manajemen sektor publik (Mardiasmo, 2002) yaitu :

a) Anggaran sebagai Alat Perencanaan (*Planning Tool*)

Sebagai alat perencanaan, anggaran sektor publik merupakan alat yang digunakan untuk melakukan berbagai perencanaan, seperti perumusan tujuan dan kebijakan, program, aktivitas, alokasi dana dan sumber pembiayaan, serta indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategis.

b) Anggaran sebagai Alat Pengendalian (*Control Tool*)

Dengan adanya anggaran, organisasi sektor publik dapat menghindari adanya pengeluaran yang terlalu berat (*overspending*) atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya.

c) Anggaran sebagai Alat Kebijakan Fiskal (*Fiskal Tool*)

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan

ekonomi. Melalui anggaran tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi.

d) Anggaran sebagai Alat Politik (*Political Tool*)

Pada organisasi sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai komitmen eksekutif dan kesepakatan legislative atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu.

e) Anggaran sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi (*Coordination and Communication Tool*)

Setiap satuan kerja pemerintah terkait dalam proses penyusunan anggaran, maka anggaran digunakan sebagai alat koordinasi antar organisasi dalam pemerintahan juga digunakan sebagai alat komunikasi antar departemen dalam lingkup organisasi.

f) Anggaran sebagai Alat Penilaian Kerja (*Performance Measurement Tool*)

Digunakan sebagai patokan dalam penilaian suatu bagian dalam pencapaian sasaran pada kenyataan suatu program pemerintah daerah. Hal ini dinilai dari besar kecilnya hasil yang dicapai yang berdasarkan anggaran yang sudah ditetapkan.

g) Anggaran sebagai Alat Motivasi (*Motivation Tool*)

Alat yang digunakan untuk memberikan dorongan pegawai dalam hal bekerja agar lebih minimalisasi, efektifis serta efisien dalam pencapaian sasaran organisasi yang sudah ditetapkan.

### **3. Partisipasi Penyusunan Anggaran**

Partisipasi Anggaran merupakan suatu proses yang melibatkan bawahan, baik individu maupun kelompok yang secara langsung di dalamnya dan mempunyai pengaruh dalam penyusunan, dan pelaksanaan serta kinerjanya akan dinilai berdasarkan pencapaian anggaran (Brownell,1982 dalam Sardjito dan Muthaher, 2007).

Partisipasi telah berpengaruh secara positif terhadap sikap pegawai, dan meningkatkan kerjasama diantara para manajer. Hal ini menegaskan bahwa partisipasi yang tinggi akan mempengaruhi moral dan inisiatif yang lebih tinggi juga (Sord dan Welsch ,1995 dalam Sardjito dan Muthaher, 2007).

Partisipasi dalam proses penyusunan anggaran daerah, memungkinkan terjadinya komunikasi yang semakin baik, interaksi satu sama lain serta menciptakan proses bekerja sama dalam tim. Hal ini akan berdampak baik dalam proses pencapaian tujuan dari anggaran daerah.

Terdapat empat tahap partisipasi anggaran menurut Mardiasmo (2002) pada akuntansi sektor pemerintahan :

#### 1) Tahap persiapan anggaran

Pada tahapan ini dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang telah tersedia. Terkait dengan adanya penafsiran tersebut maka perlu diperhatikan sebelum menyetujui

taksiran pengeluaran, yaitu dengan cara melakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat.

2) Tahap Ratifikasi

Tahap ini melibatkan proses politik yang cukup rumit dan berat. Pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya memiliki *managerial skill*, namun juga harus mempunyai *political skill*, dan *coalition building* yang memadai. Dan bantahan dari pihak legislatif.

3) Tahap implementasi/pelaksanaan anggaran

Tahap ini merupakan tahapan yang sangat penting dan harus diperhatikan oleh manajer keuangan pemerintah. Dalam hal ini manajer keuangan publik mempunyai sistem (infomasi) akuntansi dan sistem pengendalian manajemen.

4) Tahap pelaporan dan evaluasi anggaran

Tahap ini berkaitan dengan aspek akuntabilitas. Jika pada tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik. Maka diharapkan pelaporan dan evaluasi anggaran tidak akan menemukan banyak masalah.

Partisipasi Penyusunan anggaran daerah dalam proses penyusunan anggaran sangat diperlukan sebagai alat komunikasi yang baik yang dapat menciptakan interaksi antara satu dengan yang lain dalam proses bekerjasama dalam sebuah tim. Hal ini akan berdampak baik dalam proses pencapaian tujuan dari anggaran. Partisipasi penyusunan anggaran secara langsung akan mendorong

aparatus pemerintah untuk dapat mengambil bagian dalam proses pengambilan sebuah keputusan.

#### **4. Pemahaman Sistem Akuntansi**

Keputusan Mendagri Nomor 29 Tahun 2002 pasal 70 ayat pertama, tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang berbunyi: “Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah suatu sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atas kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi”.

#### **5. Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah**

Kinerja pemerintah daerah menurut Rohman (2007) dalam Tuasikal (2007) merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategi suatu organisasi.

Mardiasmo (2009) juga mengatakan peran indikator kinerja bagi pemerintah yaitu untuk membantu memperjelas tujuan organisasi, mengevaluasi target akhir (*final outcome*) yang dihasilkan,

menunjukkan standar kinerja, menunjukkan efektifitas dan membantu menentukan aktifitas yang memiliki efektifitas biaya yang paling baik untuk mencapai target sasaran.

## **6. Komitmen Organisasi**

Komitmen organisasi diartikan sebagai tingkat kepercayaan dan penerimaan tentang kerja terhadap tujuan organisasi dan mempunyai keinginan untuk tetap ada dalam organisasi tersebut (Wati,2013 dalam Safitri,2017).

Dalam pandangan ini, pegawai yang memiliki komitmen yang tinggi akan lebih mengutamakan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi ataupun kelompok. Komitmen organisasi dibutuhkan sebagai indikator kinerja pegawai. Jika pegawai memiliki komitmen yang tinggi diharapkan akan memperlihatkan kinerja yang maksimal. Apabila pegawai yang bergabung dalam organisasi dituntut adanya komitmen dalam dirinya. Dengan komitmen yang diberikan, diharapkan kinerja pegawai akan meningkat. Sekarang ini dalam perusahaan atau organisasi sektor publik sudah menggunakan komitmen yang digunakan sebagai pertimbangan dalam menaikkan jabatan atau posisi. Pegawai mempunyai perilaku yang berbeda tergantung dari komitmen yang dimiliki dalam suatu organisasi.

Apabila pegawai dengan komitmen yang rendah akan melakukan pekerjaan secara terpaksa sehingga dalam pencapaian tujuan menjadi kurang maksimal dan apabila pegawai dengan



komitmen yang tinggi akan berupaya agar dapat mencapai tujuan organisasinya.

## **B. Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian Saefulloh (2013) yang menguji pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah pada dinas pemerintah kabupaten Subang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah pada dinas pemerintah kabupaten Subang.

Penelitian Sardjito dan Muthaher (2007) menguji pengaruh Partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dengan menggunakan budaya organisasi dan komitmen organisasi sebagai variable moderating. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Variabel budaya organisasi dan komitmen organisasi juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam memoderasi hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparat pemerintah daerah.

Penelitian Ferdiani (2012) yang menguji pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial pegawai sekretariat daerah provinsi jawa tengah: komitmen organisasi dan persepsi inovasi sebagai variabel intervening. Hasil menunjukkan bahwa partisipasi

anggaran dan kinerja manajerial terdapat pengaruh yang signifikan, partisipasi anggaran dan komitmen organisasi terdapat pengaruh yang signifikan, komitmen organisasi dan kinerja manajerial terdapat pengaruh yang signifikan, partisipasi anggaran dan persepsi inovasi terdapat pengaruh yang signifikan, persepsi inovasi dan kinerja manajerial terdapat pengaruh yang signifikan.

Penelitian Arma (2010) yang menguji pengaruh pemahaman sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah dengan pengendalian internal sebagai variabel intervening. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap Kinerja SKPD melalui pengendalian internal. Sedangkan sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan tidak berpengaruh terhadap kinerja SKPD.

Penelitian Nurcahyani (2010) yang menguji pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial melalui komitmen organisasi dan persepsi inovasi sebagai variabel intervening. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Sedangkan partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial melalui komitmen organisasi dan partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial melalui persepsi inovasi.

## **C. Penurunan Hipotesis**

### **1. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Komitmen Organisasi**

Komitmen organisasi adalah sikap yang merefleksikan dimana anggota organisasi mengekspresikan perhatiannya terhadap organisasi dan keberhasilan serta kemajuan yang berkelanjutan (Luthans, 2006 dalam Safitri, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa pegawai siap dan sanggup untuk memulai upaya yang terus menerus demi keberhasilan organisasi. Pegawai tingkat bawah memiliki informasi yang lebih akurat karena mengetahui kondisi medan dilapangan daripada pegawai tingkat atas. Pegawai tingkat bawah akan berusaha memberikan informasi yang cukup kepada pegawai tingkat atas dalam melaksanakan program dan kegiatan unit.

Selain itu juga komitmen karyawan dalam organisasi dapat dijadikan sebagai salah satu sarana untuk menjaga keberlangsungan hidup organisasi. Komitmen tidak hanya dilihat dari hasil kerja yang nyata dari setiap individu, akan tetapi juga dari nilai-nilai yang berlaku didalam organisasi. Ferdiani (2012) menegaskan bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran membutuhkan keterlibatan lebih banyak pegawai dalam proses penyusunannya. Dengan keterlibatan tersebut pegawai akan lebih memahami struktur anggaran dan mampu menyelesaikan permasalahan yang mungkin akan timbul sehingga dapat dikatakan akan tumbuh komitmen yang kuat terhadap

organisasi. Tingginya komitmen terhadap organisasi akan menjadikan pegawai menyelesaikan tugas dengan baik dan lebih bertanggung jawab pada tugasnya. Dan apabila pegawai dengan komitmen yang rendah akan melakukan pekerjaan secara terpaksa sehingga dalam pencapaian tujuan menjadi kurang maksimal dan apabila pegawai dengan komitmen yang tinggi akan berupaya agar dapat mencapai tujuan organisasinya. Hal ini sejalan dengan penelitian Safitri (2017), Nurcahyani (2010) dan Ferdiani (2012) yang menyatakan terdapat pengaruh antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap komitmen organisasi.

Berdasarkan teori di atas serta untuk menguji pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap komitmen organisasi, maka penurunan hipotesisnya sebagai berikut :

*H<sub>1</sub> : Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap komitmen organisasi.*

## **2. Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansis Terhadap Komitmen Organisasi**

Sistem akuntansi merupakan bagian yang sangat penting dalam spectrum mekanisme pengendalian keseluruhan yang digunakan untuk memotivasi, mengukur, dan memberikan sanksi tindakan manajer dan pegawai dari suatu organisasi (Macintosh, 1994 dalam Arma, 2010). Menurut Tuasikal (2007) sistem akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu wadah yang dianggap relevan dalam

menghubungkan informasi yang digunakan sebagai alat koordinasi untuk mengawasi kegiatan pemerintah yang terlampir dalam APBD. Pengertian sistem akuntansi keuangan daerah itu sendiri terdapat dalam Keputusan Menteri dalam negeri No. 29 Tahun 2002 pasal (70) tentang proses pencatatan, pengelolaan, peringkasan transaksi keuangan serta melaporkan hasil pengelolaan keuangan dalam Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBD) dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum.

Dalam Organisasi sektor publik khususnya pemerintah daerah, diharuskan mempunyai pemahaman dibidang sistem akuntansi keuangan daerah dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah (Louise,1999 dalam Tuasikal, 2007). Hal ini menandakan pemahaman sistem akuntansi dapat mendorong dalam peningkatan kinerja pelayanan publik satuan kerja pemerintah daerah dan dalam pengambilan keputusan. Dalam menampilkan kinerja yang baik apalagi dalam sektor publik membutuhkan keterlibatan lebih banyak karyawan dalam proses penyusunan anggaran. Dengan keterlibatan tersebut karyawan akan lebih memahami struktur anggaran dan mampu menyelesaikan permasalahan yang akan timbul dan dalam pengamabilan keputusan. Sehingga dengan demikian akan tumbuh komitmen yang kuat terhadap organisasi. Komitmen yang tinggi terhadap organisasi akan menjadikan karyawan lebih bertanggung jawab pada tugas, maka penurunan hipotesisnya sebagai berikut:

*H<sub>2</sub> : Pemahaman sistem akuntansi berpengaruh positif terhadap komitmen organisasi.*

### **3. Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah**

Weiner dalam Coryanata (2004) yang telah dikutip kembali oleh Wulandari dan Mutmainah (2011) menyatakan bahwa komitmen organisasi merupakan dukungan dari dalam individu agar dapat melakukan sesuatu dalam menopang kesuksesan organisasi serta mengutamakan kepentingan kelompok daripada kepentingan individu. Dukungan dari setiap individu digunakan untuk mempengaruhi tingkat kesuksesan organisasi yang ikut andil dalam penyusunan anggaran dan meningkatkan kinerja manajerial.

Komitmen organisasi menjadi tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana aparat pemerintah daerah memihak suatu organisasi tertentu serta untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Komitmen yang tinggi menjadikan individu-individu lebih mementingkan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi, tetap berusaha untuk menjadi organisasi agar menjadi lebih baik dalam meningkatkan kinerja yang lebih tinggi pula. Komitmen organisasi yang rendah akan membuat individu untuk berbuat untuk kepentingan pribadinya. Penerlitian Ferdiani (2012) menyatakan terdapat pengaruh positif antara komitmen organisasi terhadap kinerja manajerial

pegawai sekretariat daerah. Sejalan dengan Sardjito dan Muthaher (2007), Wulandari dan Mutmainah (2011) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara komitmen organisasi dan kinerja aparatur pemerintah daerah. Namun berbeda dengan penelitian dari Kharisma (2015), Safitri (2015) dan Safitri (2017) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Jadi, dapat ditarik penurunan hipotesisnya :

*H<sub>3</sub> : Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah.*

#### **4. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah**

Partisipasi dalam penyusunan anggaran merupakan pendekatan yang secara umum dapat meningkatkan kinerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas organisasi. Brownell dan Mcinnes (1986) dalam Agusti (2012) menegaskan bahwa partisipasi yang tinggi dalam penyusunan anggaran meningkatkan kinerja manajerial. Menurut Sardjito dan Muthaher (2007) bahwa semakin tinggi partisipasi anggaran maka semakin kinerja aparatur pemerintah daerah akan semakin meningkat. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ferdiani (2012), Agusti (2012); Saefulloh (2013); dan Safitri (2015) menunjukkan partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh

positif terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. Hasil yang serupa yang dilakukan oleh Ferdiani (2012) menunjukkan partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nazaruddin dan Setyawan (2012); Nurfianto (2012) dan Puri (2015) menunjukkan bahwa tidak dapat pengaruh positif antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah.

Berdasarkan teori di atas serta untuk menguji kembali pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah, maka penurunan hipotesisnya sebagai berikut :

*H<sub>4</sub> : Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah.*

## **5. Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah**

Sistem akuntansi merupakan suatu proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan anggarannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi berterima umum yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. Paul (1997) dan Zimmerman (2000) dalam Tuasikal (2007) menegaskan bahwa dalam pembuatan keputusan yang berhubungan dengan pelayanan publik pemerintah daerah harus memiliki pemahaman yang memadai di



bidang keuangan daerah. Pemahaman mengenai sistem akuntansi yang semakin meningkat menyebabkan peningkatan kinerja organisasi pemerintahan dengan mendorong pengambilan keputusan dan pengendalian aktivitas keuangan oleh para manajer secara lebih baik.

Menurut Mardiasmo (2002 : 147) mengemukakan bahwa Kinerja Pemerintah Daerah akan tercapai apabila dilaksanakannya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara parsial, hal ini dapat memberikan dorongan yang kuat kinerja pemerintah daerah yang hendak dicapai.

Berdasarkan teori diatas, menunjukkan bahwa semakin baik sistem akuntansi keuangan daerah maka kinerja aparatur pemerintah akan meningkat. Sistem akuntansi keuangan daerah mencakup informasi keuangan yang tersedia menilai alokasi sumber daya. Semakin lengkap informasi keuangan yang dibutuhkan tentu akan mempermudah para pegawai dalam melakukan kerjanya. Dengan adanya sistem akuntansi keuangan yang baik dalam suatu organisasi diharapkan dapat memberikan kemudahan para aparatur pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Tuasikal (2007), Nufianto (2012), Saefulloh (2013) dan Hikmatul (2016) menunjukkan terdapat pengaruh antara pemahaman sistem akuntansi dan kinerja pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Kinerja aparatur pemerintah daerah mempunyai hubungan yang sangat erat dengan tingkat pemahaman

sistem akuntansi keuangan daerah. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arma (2010) dan Atmojo (2010) yang menunjukkan bahwa pemahaman sistem akuntansi tidak berpengaruh positif terhadap satuan kerja perangkat daerah.

Berdasarkan teori di atas, maka penurunan hipotesisnya sebagai berikut :

*H<sub>5</sub> : Pemahaman Sistem Akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah.*

#### **6. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah yang dimediasi oleh Komitmen Organisasi**

Partisipasi dalam penyusunan anggaran membutuhkan keterlibatan lebih banyak pegawai dalam proses penyusunannya. Dengan keterlibatan tersebut pegawai akan lebih memahami struktur anggaran dan dapat menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul. Sehingga dengan demikian akan tumbuh komitmen yang kuat terhadap organisasi. Komitmen yang tinggi terhadap organisasi akan menjadikan karyawan lebih bertanggung jawab pada tugas dan menampilkan kinerja yang lebih baik.

Pegawai yang ikut terlibat dalam proses penyusunan anggaran, akan memiliki komitmen yang lebih tinggi terhadap organisasi. Dengan adanya komitmen yang tinggi, pegawai akan menampilkan kinerja yang lebih baik. Namun sebaliknya apabila tingkat

komitmennya rendah maka pegawai akan terpaksa melakukan pekerjaannya sehingga kinerja yang ditampilkan akan menurun. Ferdiani (2012) menggunakan komitmen organisasi sebagai variabel intervening dalam penelitian terhadap partisipasi anggaran dan kinerja manajerial. Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara partisipasi anggaran dan komitmen organisasi, serta komitmen organisasi terhadap kinerja manajerial. Sedangkan penelitian Nurcahyani (2010) yang menyatakan tidak terdapat pengaruh antara partisipasi penyusunan dan kinerja manajerial melalui komitmen organisasi.

Berdasarkan teori di atas serta untuk menguji kembali pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah melalui komitmen organisasi sebagai variabel intervening, maka penurunan hipotesisnya sebagai berikut :

*H<sub>6</sub> : Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah melalui komitmen organisasi sebagai variabel Intervening*

#### **7. Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah melalui Komitmen Organisasi sebagai variabel Intervening**

Keputusan Mendagri Nomor 29 Tahun 2002 pasal 70 ayat (1) tentang proses pencatatan, pengelolaan, peringkasan transaksi keuangan serta melaporkan hasil pengelolaan keuangan dalam

Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Louise (1999) dalam Tuasikal (2007) menegaskan organisasi sektor publik khususnya pemerintah daerah harus memiliki pemahaman yang memadai tentang sistem akuntansi keuangan daerah dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah termasuk satuan kerja. Hal ini menandakan bahwa pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah dapat mendorong untuk peningkatan kinerja pelayanan publik Organisasi perangkat daerah daerah dan dalam pengambilan keputusan.

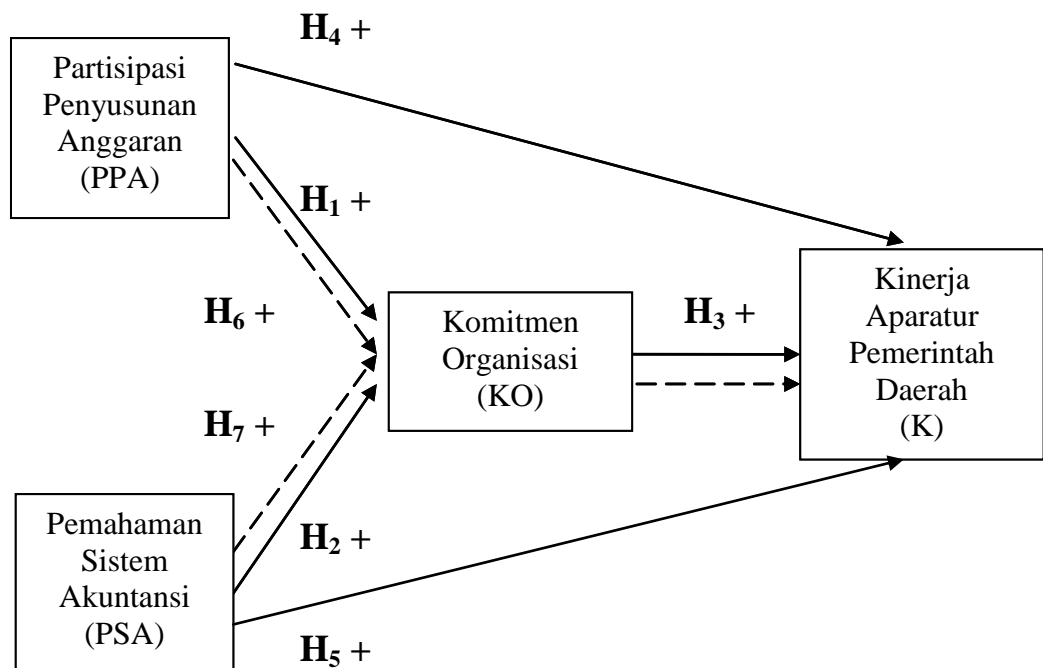
Dalam menampilkan kinerja yang baik apalagi dalam sektor publik membutuhkan keterlibatan banyak pegawai dalam proses penyusunan anggaran. Dengan keterlibatan tersebut pegawai akan lebih memahami struktur anggaran dan mampu menyelesaikan permasalahan yang akan timbul dan dalam pengambilan keputusan. Sehingga akan tumbuh komitmen yang kuat terhadap organisasi. Komitmen yang tinggi terhadap organisasi akan menjadikan karyawan lebih bertanggung jawab pada tugas. Penelitian dari Ferdiani (2012) menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sardjito dan Muthaher (2007) menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara komitmen organisasi dan kinerja aparat pemerintah daerah. Komitmen yang tinggi menjadikan individu lebih mementingkan

organisasi daripada kepentingan pribadi akan bertanggung jawab pada tugas dan menampilkan kinerja yang lebih baik.

Berdasarkan teori di atas serta untuk menguji kembali pengaruh pemahaman sistem akuntansi terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah melalui komitmen organisasi sebagai variabel intervening, maka penurunan hipotesisnya sebagai berikut :

*H<sub>7</sub> : Pemahaman sistem akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah melalui komitmen organisasi sebagai variabel Intervening*

#### D. Model Penelitian



**Gambar 2.1**  
**Model Penelitian**